

**PENGARUH PENGGUNAAN NON TUNAI DAN UPAH MINIMUM  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA  
KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI**

**I Gusti Ayu Agung Ade Tresya Dewi <sup>1</sup>**

**Anak Agung Ketut Ayuningsasi <sup>2</sup>**

*<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia*

**ABSTRAK**

Pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami fluktuasi dari tahun 2015 hingga 2018. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh berbagai aspek yang mendukung, seperti kemajuan teknologi pada bidang keuangan, pengeluaran konsumsi masyarakat yang berfluktuasi setiap tahunnya, dan upah minimum yang diterima masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penggunaan non tunai, upah minimum dan pengeluaran konsumsi baik secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi ataupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bersumber dari data sekunder yaitu data time series yang dimulai dari tahun 2015 hingga 2018 dengan jumlah data sebanyak 36 data yang menggunakan teknik analisis jalur. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 1) penggunaan non tunai dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Bali. 2) upah minimum dan pengeluaran konsumsi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sedangkan penggunaan non tunai berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. 3) pengeluaran konsumsi masyarakat memediasi pengaruh penggunaan non tunai dan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

**Kata kunci:** *non tunai, upah minimum, pengeluaran konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi.*

**ABSTRACT**

*Economic growth in regencies / cities in Bali Province experienced fluctuations from 2015 to 2018. This growth was influenced by various supporting aspects, such as technological advances in finance, public consumption expenditure which fluctuated annually, and the minimum wage received by the community to meet the needs his life. The objective to be achieved is to analyze the effect of non-cash use, minimum wages and consumption expenditure either directly or not to economic growth. This study was sourced from secondary data, namely time series data, which began from 2015 to 2018 have 36 data, using path analysis techniques. The results of this study stated that 1) the use of non-cash and minimum wages had a positive and significant effect on community consumption expenditure in districts / cities in Bali Province. 2) minimum wages and public consumption expenditure have a positive and significant effect on economic growth in districts / cities in Bali Province. While the use of non-cash has a positive and not significant effect on economic growth in districts / cities in Bali Province. 3) public consumption expenditure mediates the effect of the use of non-cash and minimum wages on economic growth in districts / cities in Bali Province.*

**Keywords:** *non-cash, minimum wage, consumption expenditure, and economic growth.*

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan alat ukur untuk melihat dan menganalisis tingkat perkembangan perekonomian di suatu negara (Deprianto, dkk, 2011). Pertumbuhan ekonomi juga berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Rimbawan,2010). Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan mengenai perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Menurut Nurhuda (2013) secara ekonomi ada beberapa cara untuk memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, baik dilihat dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Dari sisi permintaan (*demand*) yaitu dengan memperhitungkan komponen-komponen makro ekonomi berupa pengeluaran masyarakat untuk melakukan konsumsi, sedangkan dari sisi penawaran (*supply*) dengan memperhitungkan nilai tambah setiap sektor dalam produksi nasional.

Pulau Bali terkenal sebagai julukan The Island Of Temples dan pariwisata Bali menggerakkan perekonomian Bali yang terus mengalami pertumbuhan (Jamin Ariana Sukradana, dkk, 2018). Menurut Bank Indonesia (2018) pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami fluktuasi yang berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh potensi sumber daya serta daya beli masyarakat yang berbeda tiap daerahnya. Adanya perbedaan fluktuasi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber daya dan potensi

yang ada di daerah tersebut dan mengalokasikan pendapatannya guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya ikut membantu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Wiagustini dkk, 2017).

**Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2018**

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2018 (Persen)				Rata-rata
		2015	2016	2017	2018	
1	Jembrana	6,19	5,96	5,29	5,59	5,75
2	Tabanan	6,19	6,14	5,37	5,72	5,85
3	Badung	6,24	6,81	6,09	6,75	6,47
4	Gianyar	6,30	6,31	5,48	6,01	6,02
5	Klungkung	6,11	6,28	5,32	5,50	5,80
6	Bangli	6,16	6,24	5,33	5,50	5,80
7	Karangasem	6,00	5,92	5,08	5,48	5,62
8	Buleleng	6,07	6,02	5,39	5,62	5,77
9	Denpasar	6,14	6,51	6,06	6,41	6,28
<b>Provinsi Bali</b>		<b>6,15</b>	<b>6,24</b>	<b>5,49</b>	<b>5,84</b>	<b>5,93</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2019.*

Tabel 1 menunjukkan fluktuasi pada pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2015-2018. Pada tahun 2015 hingga 2016 pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali mengalami peningkatan dari 6,15 persen menjadi 6,24 persen, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 5,49 persen. Pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 5,84 persen. Jika dilihat dari data Tabel 1 rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung merupakan jumlah yang tertinggi yaitu sebesar 6,47 persen. Sedangkan, rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah di Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 5,62 persen. Perbedaan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali disebabkan oleh perbedaan tingkat kuantitas dan kualitas sumber daya alam atau potensi suatu daerah, serta perbedaan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang dimiliki (Indah Utami Dewi, dkk,

2014). Walaupun terdapat perbedaan persentase pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, hal tersebut hendaknya dianalisis guna mengetahui potensi apa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pengeluaran konsumsi juga dapat menjadi salah satu indikator dalam hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut (Badan Pusat Statistik, 2019). Menurut Suradi (2007) pengeluaran konsumsi meliputi pengeluaran untuk pangan, pakaian, perumahan, aneka barang, dan jasa. Konsumsi makanan terdiri dari beras, lauk pauk, buah-buahan, minyak, gula, rokok, dan lainnya. Konsumsi pakaian terdiri dari pakaian, sepatu, sandal, kaos kaki, dan lain-lain. Konsumsi untuk perumahan meliputi sewa rumah, biaya penerangan, biaya pemeliharaan rumah dan bahan bakar (termasuk arang dan kayu bakar) dan lain-lain. Konsumsi aneka barang dan jasa terdiri dari biaya pendidikan, transportasi, kesehatan, barang tahan lama, dan lain-lain. Konsumsi lain-lainnya yaitu untuk pajak televisi, pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan serta dana-dana lainnya yang belum tercantum.

Kebutuhan hidup manusia semakin banyak dan bertambah mengikuti pergerakan waktu. Kebutuhan pokok manusia yang meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier wajib dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia tersebut. Alokasi kebutuhan rumah tangga dapat dilihat berdasarkan pengeluaran konsumsi masyarakat yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan. Walaupun terdapat perbedaan harga antar daerah, namun nilai pengeluaran untuk konsumsi secara umum menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi (Sandra Dewi, 2017).

**Tabel 2. Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015-2018**

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Rupiah)			
		2015	2016	2017	2018
1	Denpasar	1.538.232	1.560.921	2.047.529	1.954.739
2	Badung	1.192.583	1.356.604	1.966.789	1.837.644
3	Gianyar	1.108.409	1.115.179	1.210.671	1.251.833
4	Tabanan	1.026.816	1.060.742	1.099.272	1.250.525
5	Bangli	856.555	882.997	1.003.295	1.055.237
6	Jembrana	756.299	836.284	916.813	977.506
7	Buleleng	732.915	772.561	810.532	950.532
8	Klungkung	731.393	769.131	801.947	1.116.629
9	Karangasem	628.603	677.704	726.561	772.965
<b>Bali</b>		<b>1.045.145</b>	<b>1.099.561</b>	<b>1.332.085</b>	<b>1.367.032</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2019.*

Tabel 2. menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya mulai dari tahun 2015 hingga 2018 yaitu mengalami peningkatan dari Rp. 1.045.145,00 menjadi Rp. 1.367.032,00. Pada tahun 2018 rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat tertinggi berada di Kota Denpasar yaitu sebesar Rp. 1.954.739,00 per bulannya, sedangkan terendah berada di Kabupaten Karangasem yaitu sebesar Rp. 772.965,00 per bulannya. Jumlah tersebut dapat dikatakan berbeda jauh dengan jumlah di di Kota Denpasar yang jumlah pengeluarannya cukup tinggi.

Data tabel 2. menunjukkan Kabupaten Karangasem memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi masyarakat yang rendah sedangkan Kabupaten Badung yang tertinggi. Besaran angka tersebut menunjukkan ketidakmeratanya pengeluaran konsumsi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Menurut Shandra (2012) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Hal ini terjadi karena peningkatan perkembangan konsumsi berarti telah terjadi peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa. Peningkatan produksi barang dan jasa akan menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh semua manusia, yang besarnya dapat dipengaruhi oleh faktor pendapatan, lingkungan dan kebutuhan. Provinsi Bali tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah penduduk, sehingga menyebabkan kepadatan penduduk pada daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini terjadi karena banyak penduduk dari luar Pulau Bali yang datang untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin banyak dan biaya hidup yang semakin meningkat, maka setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan gaji atau upah (Foengsitajoyo, 2016).

**Tabel 3. Upah Minimum Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2018**

No	Kabupaten/Kota	Upah Minimum Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2018 (Rupiah)			
		2015	2016	2017	2018
1	Denpasar	1.800.000	2.007.000	2.173.000	2.363.000
2	Badung	1.905.000	2.124.075	2.299.311	2.499.581
3	Gianyar	1.707.750	1.904.141	2.061.233	2.240.766
4	Tabanan	1.706.700	1.902.970	2.059.965	2.239.500
5	Bangli	1.622.000	1.808.530	1.957.734	2.128.253
6	Jembrana	1.662.500	1.662.500	2.006.617	2.181.393
7	Buleleng	1.650.000	1.839.750	1.991.529	2.165.000
8	Klungkung	1.650.000	1.829.750	1.957.734	2.164.992
9	Karangasem	1.700.000	1.895.500	2.051.879	2.180.000
<b>Provinsi Bali</b>		<b>1.621.172</b>	<b>1.807.600</b>	<b>1.956.727</b>	<b>2.127.157</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2019.*

Tabel 3 menunjukkan bahwa upah minimum di Provinsi Bali tahun 2015 hingga tahun 2018 tertinggi konsisten berada di Kabupaten Badung yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Jumlah upah minimum pada kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali relative rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten Badung. Salah satunya Kabupaten Bangli, jumlah upah minimum yang diterima pekerja di kabupaten Bangli dapat dikatakan cukup rendah jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan. Para pekerja akan memilih wilayah yang menyediakan lapangan pekerjaan dengan upah minimum yang tinggi guna memenuhi kebutuhan konsumsinya. Menurut Sandra Dewi (2017) upah minimum mempengaruhi pengeluaran konsumsi masyarakat, ini didorong keinginan masyarakat dalam memuaskan kebutuhannya baik kebutuhan primer, sekunder, sampai tersier dengan jumlah upah yang diterima masyarakat yang bekerja.

Wisnu (2013) mengungkapkan bahwa upah minimum mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dalam hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan produktifitas pekerja/buruh dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan produksi serta meningkatkan penghasilan. Dengan menetapkan upah minimum, pemerintah berupaya berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam

hal ini jika upah yang ditetapkan semakin tinggi tentunya akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada pendapatan daerah. Penetapan upah minimum dimaksudkan agar upah yang diterima oleh masyarakat tidak mengalami penurunan terutama untuk pekerja tingkat bawah atau dengan kata lain agar upah tetap stabil (Manning, 2000).

Kenaikan upah minimum yang terjadi setiap tahunnya, tentunya mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Menurut Sili Antari (2012) mengungkapkan bahwa upah minimum berpengaruh pada kegiatan pengeluaran konsumsi masyarakat, karena dengan masyarakat memiliki penghasilan maka masyarakat akan memanfaatkan upah yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat tentunya akan melakukan pembelian barang-barang kebutuhan konsumsi. Pembelian barang-barang kebutuhan dibutuhkan alat pembayaran agar dapat membantu proses pembelian.

Alat pembayaran yang sah di Indonesia yaitu uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berupa uang kertas dan logam. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Alat pembayaran tersebut terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran nontunai (*non cash*) (Bank Indonesia, 2011). Perkembangannya alat pembayaran tunai ke alat pembayaran non tunai tentunya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi mengakibatkan muncul konsep berpikir baru bagi siklus perekonomian terlebih pada sektor perbankan yang memiliki peranan besar dalam perekonomian (Rusdianasari, 2018). Munculnya inovasi pada keuangan yaitu perubahan pada sistem pembayaran merupakan penyesuaian terhadap kemajuan

teknologi yang semakin berkembang. Perkembangan sistem pembayaran mendorong meningkatnya besaran nilai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat (Rukmana, 2016).

Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menyebabkan pergeseran pada peranan uang tunai (*currency*) yang berfungsi sebagai alat pembayaran, dimana sistem pembayaran non tunai berfungsi lebih efisien dan ekonomis (Pramono, dkk, 2006). Kehadiran berbagai alat pembayaran secara non tunai, tidak hanya disebabkan oleh berbagai inovasi dalam sektor perbankan, namun juga didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya alat pembayaran yang memberikan kemudahan secara praktis sehingga dapat melakukan transaksi dengan mudah. Kemudahan transaksi tersebut dapat mendorong penurunan biaya transaksi dan pada gilirannya dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi (Dias, 1999).

Saat ini, sebagian besar negara mendorong penggunaan sistem pembayaran non tunai (Safitri, 2017). Pada 14 Agustus 2014, Bank Indonesia selaku pemegang kekuasaan tertinggi di bidang keuangan mulai mengumumkan program percepatan pemakaian transaksi non tunai atau yang lebih dikenal sebagai Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Dicanangkannya GNNT bertujuan membentuk masyarakat yang lebih banyak menggunakan instrumen non tunai (Less Cash Society/LCS). Pembayaran elektronik adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti *Integrated Circuit* (IC), *cryptography*, dan jaringan komunikasi (Majhi, 2015). Dengan menggunakan alat pembayaran non tunai diharapkan masyarakat menjadi lebih aman saat melakukan transaksi dan terhindar dari adanya tindak kriminal seperti pencurian uang maupu perampokan. Selain itu, keuntungan yang dilihat dari sisi

kepraktisan yaitu karena tanpa membawa uang tunai yang berjumlah banyak dan memakan banyak tempat dibandingkan dengan membawa alat pembayaran non tunai yang berupa kartu (*card based*) maupun e-money. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mengurangi tingkat inflasi dengan pengurangan jumlah uang beredar di masyarakat dalam jumlah yang besar (Stapleton. 2013).

Bank Indonesia menjalankan program kerja untuk meningkatkan tingkat sistem pembayaran non tunai dengan instrumen melalui pengembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Program kerja ini bertujuan untuk mengurangi uang kartal yang beredar di masyarakat sebagai langkah kecil mengurangi tingkat inflasi di Indonesia, hal ini karena jumlah uang beredar di masyarakat berpengaruh positif terhadap inflasi dalam jangka panjang (Rio Maggi, 2013). Inflasi merupakan suatu keadaan terjadinya kenaikan harga-harga secara tajam yang berlangsung dalam jangka yang cukup lama, yang disertai dengan nilai uang yang turun secara tajam yang tidak sebanding dengan kenaikan harga barang (Cahyadin, 2012). Dalam hal ini pemerintah turut berusaha mengatasi penyebaran uang tunai terlalu banyak dengan penggunaan pembayaran non tunai untuk mencegah inflasi (Thee Kian Wie dan Siwage Dharma Negara, 2010)

Ada beberapa jenis instrumen pembayaran yang digunakan oleh masyarakat saat ini. Mulai dari instrumen pembayaran berbasis kertas seperti uang tunai dan cek, hingga instrumen pembayaran elektronik seperti kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dan pembayaran mobile (Nindya, dkk, 2017). Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 mengenai Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), kartu ATM/debit adalah APMK yang digunakan untuk penarikan tunai dan

pemindahan dana, dalam hal ini kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang dapat persetujuan untuk menghimpun dana (Bank Indonesia, 2016). Pengertian kartu kredit menurut Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan APMK, kartu kredit merupakan APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, bedanya kartu kredit dengan kartu debit transaksi pada pembelanjaan atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara sekaligus ataupun secara angsuran (Bank Indonesia, 2016).

Kehadiran sistem pembayaran nontunai ini memperoleh dampak yang positif, salah satunya dengan meningkatnya jumlah kepemilikan rekening pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hampir semua produk tabungan saat ini sudah dilengkapi dengan kartu ATM untuk penarikan tunai di mesin ATM (Kontan.co.id, 2017). Kartu tersebut berfungsi juga sebagai penarikan maupun penyetoran melalui mesin ATM tanpa harus melalui Teller. Penggunaan tabungan sebagai rekening operasional, antara lain untuk menerima gaji atau penghasilan juga melakukan pembayaran, sebetulnya akan membantu dalam mengontrol pengeluaran bulanan. Dengan semakin maraknya transaksi elektronik, penarikan dan pembayaran secara tunai makin lama bisa makin diminimalkan. Sehingga, sebagian besar pengeluaran akan tercatat di dalam rekening untuk bisa dievaluasi.

**Tabel 4. Jumlah Kepemilikan Rekening Perseorangan Per Nilai Penempatan di Bali Tahun 2015-2018**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kepemilikan Rekening Perseorangan Per Nilai Penempatan di Bali Tahun 2015-2018 (Unit)			
		2015	2016	2017	2018
1	Jembrana	143.347	151.575	497.471	218.002
2	Tabanan	171.385	182.189	290.650	314.517
3	Badung	403.215	425.224	628.828	726.593
4	Gianyar	171.398	184.430	295.161	344.994
5	Klungkung	75.580	80.587	124.456	141.735
6	Bangli	67.634	72.756	103.880	121.708
7	Karangasem	129.383	136.500	198.443	246.185
8	Buleleng	284.633	303.850	401.736	503.009
9	Denpasar	1.764.620	1.896.546	1.842.303	2.092.211
<b>Provinsi Bali</b>		<b>3.211.190</b>	<b>3.433.659</b>	<b>4.382.928</b>	<b>4.708.954</b>

*Sumber: LBU Bank Indonesia, 2019.*

Tabel 4. menjelaskan bahwa jumlah rekening pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah rekening tertinggi pada tahun 2018 adalah di Kota Denpasar yaitu sebanyak 2.092.211 unit rekening dan jumlah terendah berada di Kabupaten Bangli yaitu sebanyak 121.708 unit rekening. Perbedaan jumlah rekening antar kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat dikatakan masih timpang. Kota Denpasar menduduki daerah tertinggi jumlah rekening karena mengingat Kota Denpasar sebagai sentral perekonomian Bali dengan jumlah penduduk yang cukup padat sehingga banyak terjadi kegiatan ekonomi yang melibatkan kegiatan pembayaran seperti pembayaran non tunai melalui rekening tabungan.

Kehadiran pembayaran non tunai dapat meningkatkan gairah konsumsi masyarakat, karena masyarakat dapat dengan mudahnya melakukan transaksi dimanapun tanpa harus membawa uang yang berjumlah banyak dengan berbagai resiko keamanan masyarakat (Singh, 2017). Menurut Hisbullah Basri dan Agung Anggoro

Seto (2018) menyatakan bahwa penggunaan pembayaran non tunai dapat meningkatkan pengeluaran konsumsi masyarakat. Adanya pembayaran non tunai ini menimbulkan minat yang tinggi dari masyarakat, hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat saat ini lebih sering berbelanja online dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini jumlah kepemilikan rekening perorangan yang terdapat fasilitas ATM pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tentunya dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hal tersebut sesuai dengan Tabel 2. menunjukkan rata-rata pengeluaran konsumsi masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tiap tahunnya mengalami peningkatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Oyewole (2013) menjelaskan mengenai sistem pembayaran di Nigeria, dalam hal ini menjelaskan bahwa sistem pembayaran secara nontunai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Nigeria merupakan negara yang menerapkan sistem pembayaran nontunai sedang mengalami peningkatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Ramadani (2016) mengungkapkan adanya keterkaitan antara penggunaan non tunai terhadap pengeluaran konsumsi. Hal ini dikarenakan penggunaan non tunai yang semakin tinggi akan meningkatkan pengeluaran konsumsi masyarakatnya. Hal ini juga disebabkan oleh sikap dan psikologis seseorang akan lebih mudah mengeluarkan uang dalam bentuk nontunai dibandingkan dengan bentuk tunai..

Zerlinda (2017) mengungkapkan bahwa semakin tinggi penggunaan kartu ATM/debit, maka tingkat konsumsinya akan semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan pemanfaatannya yang mudah, efisien, efektif dan fleksibel. Pemanfaatan alat pembayaran non tunai untuk transaksi sehari-hari menjadikan masyarakat sulit

mengontrol pengeluarannya serta membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan saat bertransaksi menggunakan alat pembayaran non tunai, uang yang dibelanjakan tidak berbentuk fisik sehingga akan sulit mengontrol jumlah yang telah dikeluarkan. Penelitian Jati (2015) turut menyatakan jika penggunaan non tunai menjadi salah satu cara mendorong masyarakat menjadi konsumtif dengan berbagai keuntungan dalam penggunaannya yang dapat memberikan kemudahan dan keamanan dalam penggunaannya.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah 1) Untuk menganalisis pengaruh penggunaan non tunai dan upah minimum terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali; 2) Untuk menganalisis pengaruh penggunaan non tunai, upah minimum dan pengeluaran konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali; 3) Untuk mengetahui apakah pengeluaran konsumsi masyarakat memediasi pengaruh penggunaan non tunai dan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan pertimbangan memiliki karakteristik perekonomian yang spesifik dan unik yaitu sebagai daerah yang mengalami pertumbuhan perekonomian yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan kegiatan konsumsi masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia yang terkait dengan obyek penelitian. Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh penggunaan non tunai dan upah minimum terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di

Provinsi Bali yakni terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota dalam kurun waktu 4 tahun yakni dari tahun 2015 – 2018. Total keseluruhan data dalam penelitian ini adalah sebanyak 36 data pengamatan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan Bank Indonesia.. Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah teknik analisis jalur dengan menggunakan program SPSS.

Ramadani (2016) menjelaskan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penggunaan non tunai terhadap pengeluaran konsumsi. Hal ini dikarenakan penggunaan non tunai yang semakin tinggi akan meningkatkan pengeluaran konsumsi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2015) yang menyatakan bahwa peningkatan pembayaran non tunai menginduksi pertumbuhan ekonomi dan jumlah uang yang beredar. Artinya dengan peningkatan penggunaan sistem pembayaran non tunai yang terus menerus meningkat sekarang ini telah menggeser peran uang tunai di dalam masyarakat yang lebih memilih menggunakan sistem pembayaran non tunai yang dirasa lebih cepat tanpa harus membawa uang yang berjumlah banyak untuk melakukan transaksi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Jati (2015) yang menyatakan kehadiran pembayaran secara non tunai menjadi salah memicu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah karena akan meningkatnya transaksi jual beli yang mudah dan mempercepat proses jual beli barang. Ratnawaty Marginingsih dan Imelda Sari (2019) yang menyatakan bahwa transaksi menggunakan non tunai seperti penggunaan kartu debit/ATM berpengaruh mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penggunaan alat pembayaran non tunai dapat berdampak terhadap penurunan permintaan uang dimasyarakat. Penurunan permintaan uang akan menyebabkan penurunan tingkat suku bunga di pasar uang karena masyarakat akan

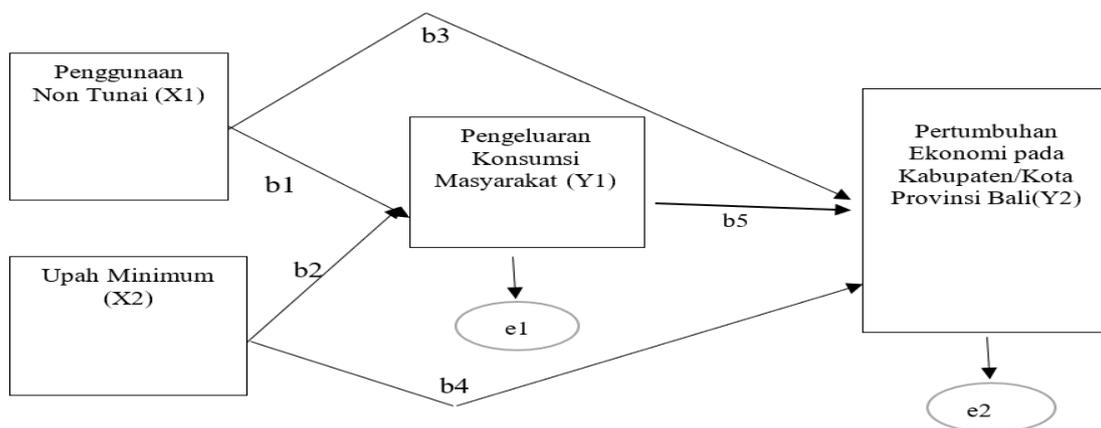
memilih menggunakan alat pembayaran non tunai yang dibarengi dengan menyimpan uang di bank yang bersangkutan. Hal ini membuat biaya pinjaman lebih kompetitif, sehingga meningkatkan investasi perusahaan, meningkatkan output riil nasional dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Bali merupakan salah satu kawasan yang diakui sebagai kawasan kreatif di dunia (Chapain dan Comunian, 2006). Bali merupakan wilayah di Indonesia yang jumlah penduduknya cukup padat, sehingga setiap tahunnya jumlah penduduk Bali mengalami peningkatan. Peningkatan penduduk yang terjadi di Provinsi Bali tentunya akan berpengaruh pada tingkat konsumsi masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Idrus Ismail (2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan menyebabkan peningkatan pengeluaran konsumsi, karena bertambahnya penduduk akan bertambah juga berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup masyarakat. Kenaikan jumlah penduduk di kabupaten/kota di Provinsi Bali juga dipengaruhi oleh kedatangan penduduk dari luar Bali. Hal ini disebabkan di Bali yang terkenal dengan destinasi pariwisatanya melahirkan lapangan pekerjaan yang luas dengan pemberian upah minimum yang cukup menggiurkan para pencari kerja.

Sandra Dewi (2017) mengungkapkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 – 2015, artinya semakin tinggi upah minimum yang ditawarkan, maka semakin tinggi konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Hal ini didorong keinginan masyarakat dalam memuaskan kebutuhannya mulai dari kebutuhan primer, sekunder hingga tersier. Menurut Sili Antari (2012), mengatakan bahwa upah minimum

mempengaruhi kegiatan pengeluaran konsumsi masyarakat, karena dengan masyarakat memiliki penghasilan maka masyarakat akan memanfaatkan upah yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhannya.

Foengsitajoyo dan Suparno (2016) mengungkapkan bahwa upah minimum mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya. Dalam hal ini pemerintah hendaknya berupaya untuk menyesuaikan tingkat upah minimum dengan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi hidupnya sehingga para pekerja mampu untuk memenuhi kebutuhan dari upah yang diperoleh. Nurhuda (2013) menyatakan bahwa tingkat konsumsi masyarakat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila terjadi kenaikan konsumsi berarti permintaan terhadap barang dan jasa juga meningkat. Peningkatan permintaan barang dan jasa ini memaksa perekonomian untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi barang dan jasa akan menyebabkan peningkatan terhadap perekonomian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan dalam Gambar 1 sebagai berikut.



**Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian Pengaruh Penggunaan Non Tunai Dan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali.**

Berdasarkan Gambar 1 persamaan struktural dapat dilihat sebagai berikut.

Struktur I

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots(1)$$

Struktur II

$$Y_2 = \alpha + \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan.

- $Y_1$  = pengeluaran konsumsi masyarakat
- $Y_2$  = pertumbuhan ekonomi
- $b_{1,2,3,4,5}$  = koefisien regresi
- $X_1$  = penggunaan non tunai
- $X_2$  = upah minimum
- $e$  = variabel pengganggu

Gambar 1 dapat dilihat anak panah  $\beta_1$  menunjukkan pengaruh secara tidak langsung variabel  $X_1$  terhadap  $Y_2$  melalui intervening  $Y_1$ . Pada anak panah  $\beta_3$  menunjukkan pengaruh  $X_1$  secara langsung terhadap  $Y_2$ . Pada anak panah  $\beta_2$  menunjukkan variabel  $X_2$  secara tidak langsung berpengaruh terhadap  $Y_2$  melalui variabel intervening  $Y_1$ . Anak panah  $\beta_4$  menunjukkan pengaruh langsung variabel  $X_2$  terhadap  $Y_2$ . Dan anak panah  $\beta_5$  menunjukkan pengaruh langsung  $Y_1$  terhadap  $Y_2$ . Nilai kekeliruan taksiran standar (*standard error of estimate*), yaitu:

$$e_i = \sqrt{(1 - R^2)} \dots\dots\dots(3)$$

Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan:

$$R_m^2 = 1 - P_{\epsilon_1}^2 P_{\epsilon_2}^2 \dots P_{\epsilon_p}^2 \dots\dots\dots(4)$$

Dalam hal ini interpretasi terhadap  $R_m^2$  sama dengan interpretasi koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada analisis regresi.  $\beta_{ei}$  yang merupakan *standard error of estimate* dari model regresi dihitung dengan rumus:

$$\beta_{ei} = \sqrt{(1 - R^2)} \dots\dots\dots(5)$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hubungan-hubungan antar variabel penelitian, yang merupakan koefisien jalur dalam penelitian ini. Pengujian data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*).

**Tabel 5. Ringkasan Koefisien Jalur**

Persamaan	Regresi	<i>Standardized Coefficient Beta</i>	Std. Error (Sb)	Probability t	Keterangan
Substruktur 1	X1→Y1	0,616	0,069	0,000	Positif dan Signifikan
Substruktur 2	X2→Y1	0,405	0,166	0,000	Positif dan Signifikan
Substruktur 3	X1→Y2	0,163	0,000	0,450	Tidak Signifikan
Substruktur 4	X2→Y2	0,648	0,000	0,001	Positif dan Signifikan
Substruktur 5	Y1→Y2	0,941	0,000	0,001	Positif dan Signifikan

### **Persamaan Struktur I Pengaruh Penggunaan Non Tunai dan Upah Minimum Terhadap Pengeluaran Konsumsi Masyarakat**

Pengujian persamaan struktur I dilakukan untuk melihat pengaruh dari upah dan bahan baku terhadap produktivitas yang dimiliki oleh masing-masing industry furniture di Kabupaten Gianyar secara langsung yang diolah menggunakan *SPSS* maka jumlah hasil persamaan struktur I dapat ditunjukkan sebagai berikut:

$$Y_1 = 0,616X_1 + 0,405X_2 + e_1$$

### **Persamaan Struktur II Pengaruh Non Tunai, Upah Minimum, dan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pengujian persamaan struktur II dilakukan untuk melihat pengaruh upah, bahan baku, produktivitas terhadap produksi secara langsung yang dilakukan dengan menggunakan program *SPSS* maka jumlah hasil persamaan struktur II dapat ditunjukkan sebagai berikut:

$$Y_2 = 1,163X_1 + 0,648X_2 + 0,941Y_1 + e_2$$

### **Nilai Kekeliruan Taksiran Standar (*standar error of estimate*)**

Untuk mengetahui nilai  $e_1$  yang menunjukkan jumlah *variance* variabel pengeluaran konsumsi ( $Y_1$ ) yang tidak dijelaskan oleh variabel penggunaan non tunai ( $X_1$ ) dan upah minimum ( $X_2$ ), dihitung menggunakan rumus :

$$e_1 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,725} = 0,5244$$

$$e_2 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,408} = 0,7694$$

Nilai kekeliruan standar  $e_1$  yang diperoleh sebesar 0,5244 memiliki arti bahwa 52,44 persen jumlah *variance* variabel pengeluaran konsumsi ( $Y_1$ ) tidak dijelaskan oleh variabel penggunaan non tunai ( $X_1$ ) dan upah minimum ( $X_2$ ).

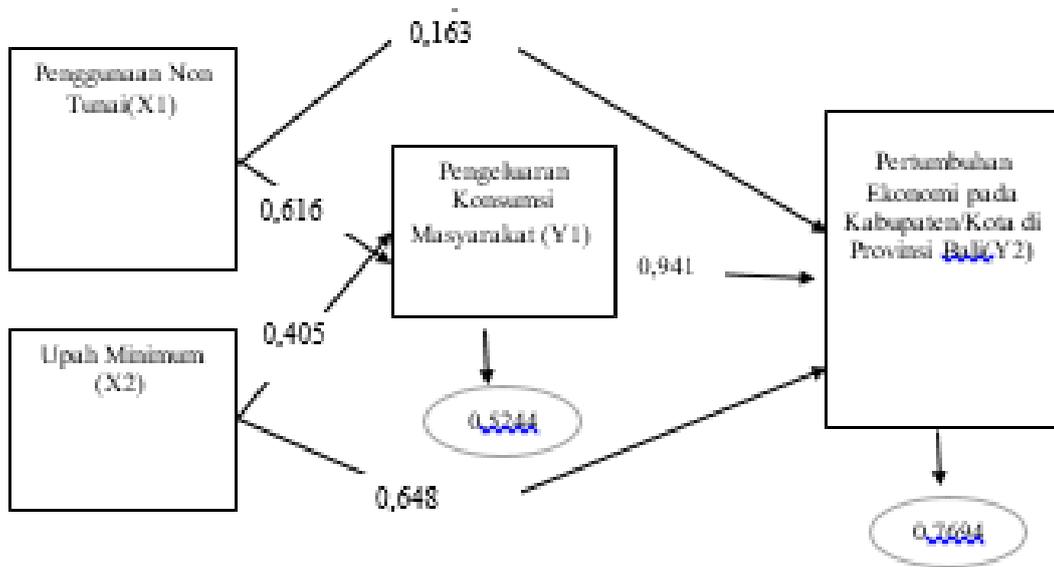
Nilai kekeliruan standar  $e_2$  yang diperoleh sebesar 0,7694 memiliki arti bahwa 76,94 persen *variance* variabel pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) tidak dijelaskan oleh variabel penggunaan non tunai ( $X_1$ ), upah minimum ( $X_2$ ), dan pengeluaran konsumsi masyarakat ( $Y_1$ ).

### **Pemeriksaan Validitas Model**

Untuk memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan, yaitu koefisien determinasi total hasilnya sebagai berikut.

$$R^2_m = 1 - (e_1)^2 - (e_2)^2 = 0,8372$$

Hasil perhitungan koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah 0,8372 memiliki arti bahwa 83,72% variasi pertumbuhan ekonomi dipengaruhi model yang dibentuk oleh penggunaan non tunai, upah minimum, dan pengeluaran konsumsi masyarakat, sedangkan 16,28 persen sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang dibentuk.



Gambar 2 koefisien jalur hubungan antar variabel

**Pengaruh Langsung Variabel**

**Pengaruh Penggunaan Non Tunai Dan Upah Minimum Terhadap Pengeluaran Konsumsi Masyarakat**

Pengujian persamaan 1 dilakukan untuk melihat pengaruh penggunaan non tunai dan upah minimum terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat secara langsung yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS Versi 23.0 maka uji regresi disajikan pada Lampiran 1. Berdasarkan Lampiran 1, penggunaan non tunai memiliki nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,431 dan nilai sig  $0,000 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa penggunaan non tunai berpengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2015-2018.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Ramadani (2016) menjelaskan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penggunaan non tunai terhadap pengeluaran

konsumsi. Hal ini dikarenakan penggunaan non tunai yang semakin tinggi akan meningkatkan pengeluaran konsumsi mahasiswa. Hal ini juga disebabkan oleh sikap dan psikologis seseorang akan lebih mudah mengeluarkan uang dalam bentuk nontunai dibanding tunai. Zerlinda (2017) semakin tinggi penggunaan kartu ATM/debit, maka tingkat konsumsinya akan semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan pemanfaatannya yang mudah, efisien, efektif dan fleksibel. Pemanfaatan alat pembayaran non tunai untuk transaksi sehari-hari menjadikan masyarakat sulit mengontrol pengeluarannya serta membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Hal tersebut dikarenakan saat bertransaksi menggunakan alat pembayaran non tunai, uang yang mereka belanjakan tidak berbentuk fisik sehingga akan sulit mengontrol jumlah yang telah mereka keluarkan. Penelitian Jati (2015) turut menyatakan jika penggunaan non tunai menjadi salah satu cara mendorong masyarakat menjadi konsumtif dengan berbagai keuntungan dalam penggunaannya.

Berdasarkan Lampiran 1, upah minimum memiliki nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,683 dan nilai sig  $0,000 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2015-2018. Hal ini sejalan dengan penelitian Sandra Dewi (2017) upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 – 2015, artinya, semakin tinggi upah minimum yang ditawarkan, maka semakin tinggi konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Hal ini didorong keinginan masyarakat dalam memuaskan kebutuhannya baik kebutuhan primer, sekunder hingga tersier. Menurut Antari (2012) mengatakan bahwa upah minimum memengaruhi kegiatan pengeluaran

konsumsi masyarakat, karena dengan masyarakat memiliki penghasilan maka masyarakat akan memanfaatkan upah yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhannya.

**Pengaruh Penggunaan Non Tunai, Upah Minimum, dan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/kota di Provinsi Bali.**

Pengujian struktur 2 dilakukan untuk melihat pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan program SPSS Versi 23.0 maka uji regresi disajikan dalam Lampiran 1. Berdasarkan Lampiran 1, penggunaan non tunai memiliki nilai *standardized coefficients beta* sebesar 1,280e-07 dan nilai *sig.* sebesar 0,450 > 0,05 yang menunjukkan bahwa penggunaan non tunai berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian Hastina (2019) menyatakan bahwa sistem pembayaran non tunai transaksi kartu debit/ATM yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Peneliti beranggapan bahwa kartu debit/ATM tidak terlalu membuat pertumbuhan ekonomi semakin bertambah atau dapat menunda kegiatan ekonomi karena jika ingin melakukan transaksi menggunakan ATM harus memiliki dana atau tabungan terlebih dahulu di bank dan harus pergi ke ATM untuk dapat menarik dananya. Dalam penelitian juga, data yang digunakan hanya pengaruh penggunaan non tunai pada ATM terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga karena keterbatasan data dalam penelitian ini yang mendukung hanya data untuk ATM, untuk data penggunaan non tunai seperti kartu kredit maupun uang elektronik belum tersedia.

Pengujian persamaan 2 dilakukan untuk melihat pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan program SPSS Versi 23.0 maka uji regresi disajikan dalam Lampiran 1. Berdasarkan Lampiran 1, lama upah minimum memiliki nilai *standardized coefficients beta* sebesar 1,229e-06 dan nilai *sig.* sebesar 0,001 < 0,05

yang menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Foengsitanjoyo dan Suparno (2016) yang mengungkapkan bahwa upah minimum mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Ditengah kesulitan dan ketidakstabilan ekonomi masyarakat yang ada di suatu daerah yang asli penduduk maupun yang datang dari luar kota ataupun luar pulau berbondong - bondong untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, oleh karena itu pemerintah harus terus menyesuaikan tingkat upah minimum sehingga para pekerja mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Dari perhitungan yang telah dilakukan maka terlihat bahwa salah satu faktor pertumbuhan ekonomi berdasar pada kenaikan upah minimum sehingga ditengah ketidakstabilan ekonomi pemerintah harus terus menyesuaikan upah minimum sehingga akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Foengsitanjoyo dan Suparno (2016) mengungkapkan bahwa upah minimum mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Di tengah kesulitan dan ketidakstabilan ekonomi, masyarakat yang ada di suatu daerah, baik penduduk asli, maupun yang datang dari luar kota ataupun luar pulau berbondong - bondong untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Oleh karena itu, pemerintah harus terus menyesuaikan tingkat upah minimum sehingga para pekerja mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Pengujian persamaan 2 dilakukan untuk melihat pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan program SPSS Versi 23.0 maka uji regresi disajikan

dalam Lampiran 1. Berdasarkan Lampiran 1, pengeluaran konsumsi memiliki nilai *standardized coefficients beta* sebesar  $1,057e-06$  dan nilai *sig.* sebesar  $0,001 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam pengeluaran rumah tangga dapat dibedakan atas pengeluaran konsumsi makanan dan pengeluaran konsumsi non makanan (Sili Antari, 2008). Pengeluaran konsumsi makanan adalah pengeluaran masyarakat yang berkaitan dengan makanan maupun minuman untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Sedangkan pengeluaran konsumsi non makanan merupakan pengeluaran masyarakat yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup berupa sandang, obat-obatan serta rekreasi serta transportasi.

Nurhuda (2013), Shandra (2012), dan Silvia, dkk (2013) yang menyatakan bahwa secara parsial pengeluaran konsumsi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi apabila saat kenaikan pada pengeluaran konsumsi berarti permintaan terhadap barang dan jasa juga meningkat. Peningkatan permintaan barang dan jasa ini memaksa perekonomian untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi barang dan jasa akan menyebabkan peningkatan terhadap perekonomian. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Ari (2019) yang menyatakan pengeluaran konsumsi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal menyatakan bahwa faktor penting yang menentukan tingkat konsumsi adalah pendapatan dari upah minimum. Tingginya konsumsi rumah tangga disebabkan oleh tingginya pendapatan masyarakat yang diperoleh dari upah minimum, sehingga secara tidak langsung perekonomian meningkat yang memberikan dampak *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi.

### Pengaruh Tidak Langsung

#### Pengaruh tidak langsung penggunaan non tunai terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran konsumsi masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali

$$\begin{aligned}
 S_{\beta_1 \beta_5} &= \sqrt{b_5^2 S_{b_1^2} + b_1^2 S_{b_5^2}} \\
 S_{\beta_1 \beta_5} &= \sqrt{b_5^2 S_{b_1^2} + b_1^2 S_{b_5^2}} \\
 &= \sqrt{(1,057e - 06)^2 (0,069)^2 + (0,431)^2 (0,000)^2} \\
 &= 7,2933e-08
 \end{aligned}$$

Keterangan :

$S_{\beta_1}$  = standar error koefisien regresi variabel  $X_1$  terhadap  $Y_1$   
 $S_{\beta_5}$  = standar error koefisien regresi variabel  $Y_1$  terhadap  $Y_2$

Menghitung nilai z hitung

$$\begin{aligned}
 z &= \frac{b_1 b_5}{s_{15}} \\
 &= \frac{(1,057e)(0,431)}{7,2933e-08} \\
 &= 6,250
 \end{aligned}$$

Oleh karena z hitung sebesar  $6,250 > 1,96$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya pengeluaran konsumsi masyarakat sebagai variabel mediasi berarti pengaruh penggunaan non tunai terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, atau dengan kata lain penggunaan non tunai berpengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran konsumsi masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali

#### Pengaruh tidak langsung upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran konsumsi masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali

$$\begin{aligned}
 S_{\beta_2 \beta_5} &= \sqrt{b_5^2 S_{b_2^2} + b_2^2 S_{b_5^2}} \\
 &= \sqrt{(1,057e - 06)^2 (0,166)^2 + (0,683)^2 (0,000)^2} \\
 &= 1,7546e-07
 \end{aligned}$$

Keterangan :

$S_{\beta_2}$  = standar error koefisien regresi variabel  $X_2$  terhadap  $Y_1$

$S_{\beta_5}$  = standar error koefisien regresi variabel  $Y_1$  terhadap  $Y_2$

Menghitung nilai z-hitung

$$\begin{aligned} z &= \frac{b_{2b7}}{S_{27}} \\ &= \frac{(1,057e)(0,683)}{1,7546e-07} \\ &= 4,110 \end{aligned}$$

Oleh karena z hitung sebesar  $4,110 > 1,96$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya pengeluaran konsumsi masyarakat sebagai variabel mediasi berarti pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, atau dengan kata lain upah minimum berpengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran konsumsi masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

### **Implikasi Hasil Penelitian**

Provinsi Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota dikenal sebagai pulau dengan tujuan pariwisata ternama di mancanegara dengan keragaman budaya dan keindahan alamnya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Setiap daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali memiliki pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda, hal ini karena setiap daerah memiliki kondisi perekonomian yang berbeda-beda. Kondisi perekonomian yang berbeda pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali akan mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi di daerahnya, seperti salah satunya pengeluaran konsumsi masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Fokus dalam penelitian ini adalah pengaruh penggunaan non tunai dan upah minimum terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan non tunai dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat. Hal ini terjadi karena dengan upah minimum yang diterima masyarakat yang setiap tahunnya mengalami peningkatan disertai dengan kecanggihan teknologi pada pembayaran non tunai yang aman dan efisien akan meningkatkan kegiatan konsumsi masyarakat. Pembayaran non tunai tersebut salah satunya yaitu kartu ATM/debit. Kehadiran sistem pembayaran non tunai tersebut membawa berbagai perubahan, seperti perubahan perilaku pengguna non tunai yang cenderung lebih konsumtif dalam menggunakan hasil upah yang diterima dalam jumlah yang mencukupi. Kemudahan penggunaan non tunai dalam bertransaksi yang aman dan efisien tanpa harus datang ke bank serta tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah banyak untuk melakukan transaksi membuat masyarakat lebih sering melakukan transaksi menggunakan non tunai dalam bertransaksi sehingga berpengaruh pada pengeluaran konsumsi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah dan lembaga keuangan untuk dapat memberikan fasilitas non tunai yang memadai agar memberikan kemudahan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan non tunai.

Dengan meningkatnya pengeluaran konsumsi masyarakat akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Keterkaitan pengeluaran konsumsi masyarakat memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat, perputaran produksi dan konsumsi barang maupun jasa akan berjalan lancar pada daerah tersebut. Dalam hal ini

besarnya pengeluaran konsumsi, tidak terlepas dari upah minimum yang diterima masyarakat. Keterkaitan upah minimum memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, karena semakin meningkatnya upah menunjukkan daerah tersebut memiliki potensi lapangan kerja yang baik. Lapangan kerja yang baik menunjukkan kondisi ekonomi yang baik akan menarik minat masyarakat untuk bekerja di daerah tersebut, sehingga kegiatan produksi dan konsumsi di daerah tersebut akan membaik serta berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Penggunaan non tunai tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena dalam penelitian ini membahas penggunaan non tunai berupa kartu ATM/debit, dalam hal ini diketahui bahwa kartu debit/ATM tidak terlalu membuat pertumbuhan ekonomi semakin bertambah atau dapat menunda kegiatan ekonomi karena jika ingin melakukan transaksi menggunakan ATM harus memiliki dana atau tabungan terlebih dahulu di bank dan harus pergi ke ATM untuk dapat menarik dananya sehingga jika tidak terdapat fasilitas konter ATM maupun pembayaran di pasar di daerah terdekat, maka akan membuat masyarakat enggan untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan non tunai.

Penggunaan non tunai dan upah minimum berpengaruh secara tidak langsung melalui pengeluaran konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan upah yang diterima masyarakat daerah dalam melakukan transaksi non tunai untuk pengeluaran konsumsi masyarakat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti pengeluaran konsumsi masyarakat adalah faktor yang menjadi pengaruh dalam langkah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang

merata sehingga dibutuhkan kontribusi dari pemerintah daerah untuk memperhatikan pemberlakuan upah minimum bagi masyarakat daerah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan fasilitas non tunai yang memadai di setiap daerah agar kegiatan ekonomi daerah dapat berjalan dengan lancar.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka ditarik simpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan non tunai dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 2) Upah minimum dan pengeluaran konsumsi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan penggunaan non tunai tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 3) Pengeluaran konsumsi masyarakat memediasi pengaruh penggunaan non tunai dan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten.kota di Provinsi Bali.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa sasaran sebagai berikut:

- 1) Penggunaan pembayaran secara non tunai di Provinsi Bali saat ini semakin banyak menarik minat masyarakat dalam penggunaannya. Dalam hal ini, lembaga bank dan pemerintah yang berwenang dalam menyediakan pelayanan pembayaran non tunai

akan lebih baik jika penyebarannya dilakukan secara merata secara merata di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini agar tidak terjadi ketimpangan perkembangan penggunaan non tunai, sehingga masyarakat di pedesaan tidak pergi jauh ke kota untuk mencari ATM saat ingin bertransaksi menggunakan non tunai.

- 2) Upah minimum di Provinsi Bali setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah. Hal ini didukung oleh PDRB di Provinsi Bali yang semakin meningkat karena kemajuan pada masing-masing sektor yang mendukung pertumbuhan ekonominya. Namun pemberlakuan upah minimum pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali lebih baik jika pemerintah daerah memberikan keadilan jumlah upah minimum yang sebanding dengan potensi dari daerah tersebut. Upah minimum yang diperoleh masyarakat tentunya akan mempengaruhi jumlah pengeluaran konsumsinya, semakin banyak jumlah upah minimum yang diperoleh maka semakin banyak pengeluaran konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya begitupun sebaliknya. Jika konsumsi masyarakat tinggi hal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, karena kegiatan jual beli barang/jasa di daerah tersebut berjalan dengan lancar. Dalam hal ini pemerintah daerah akan lebih baik menggali potensi daerah dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat dengan pemberian upah minimum yang layak.

## **REFERENSI**

- Cahyadin, Malik. 2012. Interaksi Antara Indikator Moneter Dan Indikator Makroekonomi Di Indonesia Tahun 2005-2010. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 5 (2), hal. 101-108.
- Chapain dan Comunian. 2006. Enabling or Inhibiting the Creative Economy: The Role of the Local and Regional Demensions in England. (*Working Paper*) *Economic Geography Research Group*.

- Deprianto, Asrizal, Jolianis. 2011. Pengaruh Konsumsi Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat*. 4 (2), hal. 1-17.
- Dias, Silva. 1999. The demand for Digital Money and Its Impact on the Economy. *Brazilian Electronic Journal of Economics*, Vol. 2. No.2. hal. 1-14.
- Foengsitanjoyo, Trisantoso Julianto dan Suparno. 2016. Analisis Pengaruh Jumlah Industri Besar Dan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Volume 1 (2), hal 229 – 256.
- Hastina, Febriaty. 2019. Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Era Digital Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Vol 2 (2), hal. 3016-313.
- Idrus Ismail. 2018. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Konsumsi Beras di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Development Review*. Vol 1 (1), hal 74-85.
- Indah Utami Dewi, Ida Ayu; Made Kembar Sri Budhi; dan Wayan Sudirman. 2014. Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 3 (2) : 68-80.
- Jamin Ariana Sukradana, I Nyoman. 2018. Dampak Keberadaan Villa Bagi Masyarakat di Banjar Canggu Kuta Bali. *Jurnal Kepariwisata dan Hospitalitas*, 2 (1), hal. 46-65.
- Jati, Wasisto Raharjo. 2015. *Less Cash Society: Menakar Mode Konsumerisme Baru Kelas Menengah Indonesia*. *Jurnal Sosioteknologi*, 14 (2), hal 102-112.
- Majhi, G Panda, P. K. Dash. 2015. Electronic Money: An Essence of E-Commerce. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*
- Manning, Chris. (2000). "Labour Market Adjustment to Indonesia's Economic Crisis: Context, Trends, and Implications". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 36(1), 105-136.
- Nindya, Resti Ramadhani Putri, Raden Aswin Rahadi, Isrochmani Murtaqi. 2017. A Conceptual Study On The Use Of Electronic Payment Instruments Among Generation Z In Bandung City. *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship*. Vol. 3 (9), hal. 32-40.
- Nurhuda. 2013. Analisis Konsumsi Dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 2 (3), hal. 110-122.
- Oyewole, Oginni Simon. 2013. Electronic Payment System and Economic Growth: A Review of Transition to Cashless Economy in Nigeria. *International Journal of Scientific Engineering and Technology*, Vol 2 (9), hal. 1-13.
- Pramono, Bambang, Tri Yanuarti, Pipih D. Purusitawati, dan Yosefine Tyas Emmy. 2006. Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter. *Working Paper Indonesia*, No WP/11/2006.
- Ramadani, Laila. 2016. Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8 (1), hal 1-8.
- Ratnawaty Marginingsih dan Imelda Sari. 2019. Nilai Transaksi Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2014-2018. Universitas Bina Saran Informatika. Vol. 2 (8), hal. 13-24.

- Rimbawan, Nyoman Dayuh. 2010. Pertumbuhan Ekonomi Dan Kegiatan Ekonomi Angkatan Kerja Di Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*, 6 (2), hal. 1-12.
- Rio Maggi. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia Model *Demand Pull Inflation*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6 (2), hal. 71-77.
- Rukmana, Rismawati. 2016. Dampak Perkembangan Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Vol. 4 (2), hal 7-19.
- Rusdianasari, Fitri. 2018. Peran Inklusi Keuangan melalui Integrasi Fintech dalam Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11 (2), hal. 244-253.
- Safitri, Dini. 2017. Implementation of Campaign Strategy For National Non Cash Movement From Bank of Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 150, hal. 13-17.
- Sandra Dewi. 2017. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2015. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Vol. 1 (1), hal. 1-10.
- Shandra, Yosi. 2012. Konsumsi dan Investasi serta Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi*. Volume 1 (1), hal 1-14.
- Sili Antari , Ni Luh. 2012. Pengaruh Pendapatan, Pendidikan, Dan Remitan Terhadap Pengeluaran Konsumsi Pekerja Migran Nonpermanen Di Kabupaten Badung (Studi Kasus Pada Dua Kecamatan Di Kabupaten Badung). *Jurnal Piramida*, 4 (2), hal. 1-18.
- Silvia, Dkk. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Inflasi di Indonesia. *Jurnal kajian ekonomi*. Volume 1 (02), hal 1-15.
- Singh, S. 2017. Study of Consumer Perception of Digital Payment Mode. *Journal of Internet Banking and Commerce*, 22 (3), page 1–7.
- Stapleton. 2013. Unlocking the Transformative Potential of Branchless Banking in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 49, No. 3.
- Sumartini, Ade Ruly, I Gusti Ayu Ketut Giantari, Putu Yudi Setiawana. 2018. Peran Kepuasan Pelanggan Dalam Memediasi Hubungan Pengalaman Berbelanja Secara Online Dengan Perilaku Pasca Pembelian. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11 (1), hal. 91-101.
- Thee Kian Wie dan Siwage Dharma Negara. 2010. Survey of Recent Developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol.46, No. 3.
- Wisnu, Ari Wibowo. 2013. Pengaruh Faktor Aglomerasi Industri, Angkatan Kerja dan Tingkat Upah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Semarang*. Vol. 1 (2), hal 23-36.
- Wiagustini , Ni Luh Putu, I Ketut Mustanda, Luh Gede Meydianawathi, Nyoman Abundanti. 2017. Potensi Pengembangan Investasi Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10 (2), hal. 155-173.